

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan, dan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta mengoptimalkan daya guna dan hasil guna dana desa, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);

- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

- 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 12. Dana Desa, yang selanjutya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 13. Prioritas Penggunaan Dana Desa yang selanjutnya disebut Prioritas Penggunaan DD adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 14. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- Pasal 2
- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi DD setiap tahun anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi DD setiap tahun anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian DD;
- b. prioritas Penggunaan DD;
- c. penyaluran DD;
- d. pelaksanaan DD
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban DD;
- f. pemantauan dan evaluasi DD; dan
- g. sanksi DD.

BAB IV PENGALOKASIAN DD Pasal 4

- (1) Pengalokasian DD setiap Desa setiap tahun anggaran dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.

- (2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar pada tahun bersangkutan yang diterima Pemerintah Daerah dengan jumlah Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot dan variabel sebagai berikut :
 - a. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah;dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan basis data kondisi per 31 (tiga puluh satu) desember tahun sebelumnya yang dipublikasikan dan/atau disahkan oleh instansi pemerintah, terdiri dari ;
 - a. jumlah penduduk berpedoman pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
 - b. jumlah penduduk miskin berpedoman pada data Kementerian Sosial:
 - c. luas wilayah berpedoman data Badan Pusat Statistik; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis berpedoman data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah atau Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kementerian Keuangan.
- (5) Perhitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rumus:

AF setiap Desa =
$$\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 x Z4)\} * (DD kab - AD kab)$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

- Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Daerah.
- Z2= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Daerah.

- Z3= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Daerah.
- Z4= rasio Indek Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa terhadap total IKG Desa se-Daerah.

DD kab = besaran DD kabupaten

AD kab = besaranAlokasi Dasar kabupaten

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun kertas kerja penghitungan DD setiap Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara untuk bahan informasi pagu indikatif DD dalam penyusunan RKPDesa dengan standar format berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sebagian atau keseluruhan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum tersedia pada saat penghitungan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menggunakan sebagian atau keseluruhan variabel yang digunakan pada perhitungan DD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Apabila hasil penghitungan DD diperoleh nilai pecahan, Dinas dapat melakukan penghitungan pembulatan sampai dengan digit tiga atau satuan ribuan dengan memberikan sisa pembulatan kepada Desa yang memperoleh DD terkecil atau mengambil kekurangan akibat pembulatan dari Desa yang memperoleh DD terbesar.
- (4) Pagu definitif DD setiap Desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditetapkannya APBD.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DD Bagian Kesatu Umum Pasal 6

prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsipprinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan lebih mendesak, kepentingan Desa yang lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dar kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 7

- Penggunaan (1) Prioritas DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2)Prioritas penggunaaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui mekanisme dan menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran Desa setiap tahun.
- (3) Prioritas penggunaaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan sebagai bagian dari publikasi Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDesa, serta dapat dipublikasikan secara khusus sesuai kondisi desa setempat.

Bagian Kedua Bidang Pembangunan Desa Pasal 8

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- 1. lingkungan pemukiman;
- 2. transportasi;
- 3. energi; dan
- 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Ketiga Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 9

DD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan prioritas antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h.dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi

masyarakat Desa lainnya;

- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k.bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 10

Desa dalam hal menyusun Prioritas Penggunaan DD selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat mempertimbangkan Prioritas Penggunaan DD pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat menurut tipologi Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB VI PENYALURAN DD Pasal 11

- (1)Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (2) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan tahapan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
 (4); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rincian DD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Penyaluran DD Tahap I dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui

Dinas yang diketahui Camat;

- b. copy buku RKD;
- c. copy Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penyaluran DD Tahap II dilakukan dengan persyaratan:

- a. surat permohonan kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas yang diketahui camat;
- b. copy buku RKD;
- c. Iaporan realisasi penyerapan DD tahap I yang menunjukkan paling sedikit penyerapan DD tahap I sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan paling sedikit capaian output DD Tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (5) DD Tahap II disalurkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu induk, ditambah atau dikurangi selisih pagu definitif baru sesuai dengan pagu definitif DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII PELAKSANAAN DD Pasal 12

Pelaksanaan DD diselenggarakan dengan mekanisme dan menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai APBDesa.

BAB VIII LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD Pasal 13

Laporan dan pertanggungjawaban DD dilakukan dengan

mekanisme dan menjadi bagian dari laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi DD, Kepala Desa menyampaikan laporan DD yang terdiri dari:
 - a. Iaporan penetapan Prioritas Penggunaan DD tahun anggaran berkenaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBDesa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD
 Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d disampaikan paling lambat
 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Iaporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) kepada Bupati melalui Dinas dan diketahui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (3) Untuk keperluan konsolidasi data pelaporan DD, selain dokumen fisik (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan laporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
- (4) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas.
- (5) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) belum tersedia, dokumen elektronik (softcopy)
 disampaikan menggunakan aplikasi umum pengolah data.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI DD Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD di RKD.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD ditemukan SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA
 DD tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) SiLPA DD lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) SiLPA DD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditetapkan, sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Perwusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam

peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

Pasal 16

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sesuai kebutuhan
- (4) Dinas, Inspektorat Daerah, Camat dan perangkat daerah terkait melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan penetapan rincian DD setiap Desa.
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan prioritas penggunaan DD melalui mekanisme perencanaan desa;

- c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban DD.
- d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya / gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang didanai dari DD.
- e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan audit, review, pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan DD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) meliputi:
 - a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan desa yang didanai dari DD bagi Tim Penyusun RPJMDesa dan RKPDesa.
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan DD bagi Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan.
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan DD bagi Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan atau Tim Pengelola Kegiatan.
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya / gotongroyong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa yang didanai dari DD
 - e. pembinaan dan pengawasan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas dan/atau Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas dan Camat dapat dibantu oleh tenaga pendamping atau fasilitator dari kalangan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI DD Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi DD, Bupati memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. terdapat sisa DD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); dan/ atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan DD.

Pasal 20

(1) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan. (2) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 21

- (1) DD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1) huruf a dan huruf c disalurkan kembali dari Rekening KasUmum Daerah ke RKD dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah dicukupi oleh Desa; dan/ atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, DD tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di Rekening Kas Umum Daerah dan dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya atau mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) DD yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan paling lama akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya atau mendahului Perubahan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran DD ke RKD sebagai dampak pemotongan penyaluran DD dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah akibat masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 23

Ketentuan mengenai:

- a. daftar referensi Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- b. format laporan penetapan Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
- c. format surat Kepala Desa perihal permohonan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau ayat (4);
 dan
- d. format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b atau huruf c.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka permohonan penyaluran DD dari Desa yang sudah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Dinas tetap diproses sampai dengan realisasi tranfer DD dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa dengan berpedoman pada ketentuan sebelumnya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DD (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 3 Mei 2017 BUPATI TRENGGALEK, TTD EMIL ELESTIANTO Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARN

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 41 TAHUN 2017

TENTANG: PENGELOLAAN DANA DESA

A. DAFTAR REFERENSI PRIORITAS PENGGUNAAN DD

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	rumah sehat	unit
		selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	selokan	meter
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan	tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	tempat pembuangan sampah	unit
PEMBANGUNAN DESA	pemeliharaan sarana dan	gero bak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	gero bak sampah	unit
	ingkungan kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	kendaraan pengangkut sampah	unit	
		mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	mesin pengolah sampah	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pengadaan, pembangunan,	tambatan perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	tambatan perahu	unit
	pengembangan dan pemeliharaan	Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jalan Desa	meter
	sarana prasarana transportasi	Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jalan Pemukiman	Meter
		jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	jembatan Desa	Meter

		gorong-gorong	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	gorong-gorong	Meter
		terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	terminal Desa	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
		pernbangkit listrik tenaga rnikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pernbangkit listrik tenaga rnikrohidro	watt
	Pengadaan,	pernbangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pernbangkit listrik tenaga diesel	watt
	pernbangunan, pengernbangan dan perneliharaan	pernbangkit listrik tenaga rnatahari	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pernbangkit listrik tenaga rnatahari	watt
	sarana dan prasarana energi	instalasi biogas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	instalasi biogas	unit
	process area area.	jaringan distribusi tenaga listrik	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	jaringan distribusi tenaga listrik	watt
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan	satuan
	Pengadaan, pembangunan, pernanfaatan dan	jaringan internet untuk warga Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	jaringan internet untuk warga Desa	unit
perneliharaan sarana dan prasarana	perneliharaan	website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	website Desa	unit
	prasarana informasi dan kom	peralatan pengeras suara (loudspeaker	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	peralatan pengeras suara (loudspeaker)	unit
		telepon urn urn	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	telepon urnurn	unit
		radio Single Side	Pembangunan/Pemeliharaan/	Swakelola/	radio Single	unit

		Band (SSB)	Pengembangan	Pihak Ketiga	Side	
					Band (SSB)	
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain- lain (Sebutkan)	satuan
		air bersih berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	air bersih berskala Desa	unit
		sanitasi lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	sanitasi Iingkungan	unit
		jarnbanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	jarnban	unit
		rnandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	rnandi, cuci, kakus (MCK)	unit
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan	mobil/ kapal motor untuk ambulance Des a	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	mobil/kapal motor untuk Kontrak ambulance Desa	unit
	sarana prasarana kesehatan	alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	alat bantu penyandang dis a bili tas	unit
		panti rehabilitasi penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	panti rehabilitasi penyandang disabilitas	unit
		poliklinik/ balai pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	poliklinik/ balai pengobatan	unit
	posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	posyandu	unit	
		penambahan ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/ perahu)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	ruang rawat inap poskesdes (posyandu apung/ perahu)	Unit

	tambahan Peralatan kesehatan Emergency poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	peralatan kesehatan emergency poskesdes	unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan	satua
Pengadaan, pembangunan,	taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	taman bacaan masyarakat	unit
pembangan dan pemeliharaan	bangunan PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	bangunan PAUD	unit
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	buku dan peralatan belaj ar PAUD lainnya	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	buku dan peralatan belaj ar PAUD lainnya	unit
	wahana permainan anak di PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	wahana permainan anak di PAUD	unit
	taman belaj ar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	taman belaj ar keagamaan	unit
	Bangunan perpustakaan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	bangunan perpustakaan desa	unit
	buku / bahan bacaan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	buku/bahan bacaan	unit
	Balai pela tihan / kegia tan belaj ar masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	balai pelatihan /kegiatan belaj ar masyarakat	unit
	sanggar seni	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	sanggar seni	unit
	film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	film dokumenter	unit
	peralatan kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	peralatan kesenian	unit
	amphitheater di	Pembangunan/Pemeliharaan/	Swakelola/	amphitheater	unit

		ruang publik pantai	Pengembangan	Pihak Ketiga	di ruang publik pantai	
		fasilitas penunjang acara tradisi " sedekah la u t"	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	fasilitas penunj ang acara tradisi " sedekah laut"	unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	gadaan, bangunan, _	Bendungan berskala kecil	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	bendungan berskala kecil	unit
penge peme sarar	gembangan dan eliharaan na prasarana luksi usaha	pembangunan atau perbaikan embung dan/ atau sistem pengairan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	em bung dan pengairan / atau sistem	unit
perta	anian un tuk hanan pangan	irigasi D esa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	irigasi Desa	meter
dan u	usaha anian berskala	percetakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	lahan pertanian	m2
produ	luktif yang kuskan pada	kolam ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	kolam ikan	m2
kebija	jakan satu a satu produk	kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	kapal penangkap ikan	unit
unggulan		tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	tempat pendaratan kapal penangkap ikan	unit
	tambak garam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	tambak garam	m2	
	kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	kandang ternak	unit	
	mesin pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	mesin pakan ternak	unit	
		Gudang	Pembangunan/Pemeliharaan/	Swakelola/	gudang	unit

	penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pengembangan	Pihak Ketiga	penyimpanan sarana prod uksi pertanian (saprotan)	
	pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang / seareef	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pusat budidaya .pembenihan dan keram ba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ seareef	Unit
	rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pasar ikan	Unit
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil	pengeringan hasil pertanian seperti: lantai j emur gabah, j agung, kopi, coklat, ktempat penj emuranopra, dan ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
pertanian untuk ketahanan pangan	lumbung Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	lum bung D esa	unit
dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	gudang pendingin (cold storage)	unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	unit
Pengadaan, pembangunan,	mesin j ahit	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	mesin j ahit	unit

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada	peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	peralatan bengkel kendaraan bermotor	unit
kebijakan satu Desa satu produk unggulan	mesin bubut untuk mebeler	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	mesin bu but untuk mebeler	unit
	Lainnya (Sebutkan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lainnya (Sebutkan)	satuan
Pengadaan,	pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pasar Desa	unit
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan	pasar sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pasar sayur	unit
prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu	pasar hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pasar hewan	unit
Desa satu produk unggulan	Tempat pelelangan Ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	tempat pelelangan ikan	unit
	Toko online	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	toko online	unit
	Gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	gudang barang	unit
	Lain-lain	Pembangunan/Pemeliharaan/	Swakelola/	Lain-lain	satuan

	(Sebutkan)	Pengembangan	Pihak Ketiga	(Sebutkan)	
Danasala	pondok wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pondok wisata	unit
Pengada pembang pemanfa	gunan, atan dan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	panggung hiburan	unit
pemeliha sarana d	an kios cenderamata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	kio s cenderamata	unit
prasaran desa	kios warung maka	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	kios warung makan	unit
	wahana permainar anak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	wahana permainan anak	unit
	wahana permainar outbound	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	wahana permainan outbound	unit
	taman rekreasi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	taman rekreasi	unit
	tempat penjualan tiket	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	tempat penjualan tiket	unit
	rumah penginapar	Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	rumah penginapan	unit
	angkutan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	angkutan wisata	unit
	Femeliharaan j oggingpath track wisatawan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Femeliharaan joggingpath track wisatawan	meter
	Tembok laut kawasan wisata lau	t Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tembok laut kawasan wisata laut	meter
	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

	penggilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	penggilingan padi	unit
Pengadaan,	peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	peraut kelapa	unit
pembangunan, pemanfaatan dan	penepung biji- bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	penepung biji- bijian	unit
pemeliharaan sarana dan	pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pencacah pakan ternak	unit
prasarana Teknologi Tepat	sangrai kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	sangrai kopi	unit
Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan	pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pemotong/ pengiris buah dan sayuran	unit
pada kebijakan satu Desa satu	pompa air	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pompa air	unit
produk unggulan	traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	traktor mini	unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Se bu tkan	satuan
Pengadaan, pembangunan,	Pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Pembuatan terasering	m2
pengembangan dan pemeliharaan	kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	kolam untuk mata air	m2
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	plesengan sungai	m2
	pencegahan abrasi pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pencegahan abrasi pantai	m2
	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penana man bakau	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman	Pohon

				bakau	
	Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Sarana prasarana pengelolaan sam pah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Sarana prasarana pengelolaan sam pah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Unit
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan	pembanguna jalan evakuasi dalarn bencana gunung berapi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya	Pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pemban gunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	meter
	pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	pembangunan gedung pengungsian	unit
	rehabilitasi dan	Pembangunan/Pemeliharaan/	Swakelola/	pembersihan	unit

rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Pengembangan	Pihak Ketiga	lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	
Lain-lain	Pembangunan/Pemeliharaan/	Swakelola/	Lain-lain	satuan
(Sebutkan)	Pengembangan	Pihak Ketiga	(Sebutkan)	Satuan

Keterangan : Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah sifat kegiatan + kegiatan. Contoh : Pembangunan jalan desa, pemeliharaan pompa air, dst

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		Penyediaan air bersih berskala Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Rumah tangga sasaran	KK
		pelayanan kesehatan lingkungan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lingkungan sasaran	Lokasi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Dukungan terhadap pelayanan sosial dasar (kesehatan)	penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah	Swakelola/ Pihak Ketiga	Balita dan Anak sekolah sasaran	Org
		pengelolaan balai pengobatan Desa;	Swakelola/ Pihak Ketiga	Balai Pengobatan	Unit
		perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Bumil yang ditangani	Org
		pengobatan untuk lansia	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah lansia yang ditangani	Org
		fasilitasi keluarga berencana	Swakelola/ Pihak Ketiga	Keluarga sasaran	KK
		pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Penyendang disabilitas yang	Org

			dibantu	
	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	dukungan insentif guru PAUD	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah guru PAUD	Org
Dukungan terhadap pelayanan sosial dasar (pendidikan)	dukungan insentif guru taman belajar keagamaan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Guru TPA	Org
	penyelenggaraan pelatihan kerja	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah pelatihan	Kali
	penyelengaraan kursus seni budaya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah kursus	Kali
	dukungan pemberdayaan bidang olahraga	Swakelola/ Pihak Ketiga	Cabor olahraga	Cabor
	pelatihan pembuatan film dokumenter	Swakelola/ Pihak Ketiga	Film dokumenter	Film
	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	BUMDesa / BUMDesa Bersama	unit
Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan olel BUM Desa/BUM Desa Bersama	Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
	Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
	Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
	Pengem bangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
	Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org

	Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Bantuan permodalan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
	Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
	Workshop Business Plan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengiku ti workshop	org
	Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
pelatihan dan pemagangan	Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kem bali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org

		Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kem bali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya musyawarah/rembug warga	frk
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian			org
		Lain-lain (Sebutkan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
		Pelatihan paralegal Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
		Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	org
	Sosialisasi dari edukasi kesehatan	Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang teredukasi	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
	Peningkatan investasi ekonomi	Pelatihan pengolahan bahan	Swakelola/	Jumlah peserta yang	Org

Desa melalui pengadaan,	pangan	Pihak Ketiga	terlatih	
pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	unit
	Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	Unit
	Pameran hasil produksi pengelolahan tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	frk
	Pelatihan e-markerting dan pembuatan website untuk pemasaran hasil prod uksi pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
	Pelatihan benih kerapu, tukik ctan budidaya cemara laut dan bakau	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
	Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	frk
	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal se bagai komoditas strategi ekonomi-wisata	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan membuat barang- barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/ daun, dll)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	Pelatihan tentang hak-hak	Swakelola/	Jumlah peserta yang	org

		perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	Pihak Ketiga	terlatih	
		Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggarnya Bazar	frk
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
		Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosilaisasi	org
Pr	Promosi dan edukasi kesehatan	Festival makanan olahan hasil laut	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya festival	frk
	nasyrakat serta gerakan hidup persih dan sehat	Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat " anak pantai"	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	org
		Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
m te	Peningkatan kapasitas kelompok nasyrakat untuk energi erbarukan dan pelestarian	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	org
	ingkungan hidup	Percontohan instalasi dan pusat/ ruang belaj ar teknologi tepat guna	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan yang ter la tih tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	unit

	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap			org
Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Membentuk/ memperbaharui kelembagaan lokal untuk menj aga kelembagaan lokal kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	unit
	Lain-lain (Sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (Sebutkan)	satuan

B. FORMAT LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN

		KEGIATAN PRIORITAS									BELUM PRIORITAS											
			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					PEMBERDAYAAN			PENYELENGGARAAN		PEMBINAAN									
NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA	SARANA PRA	SARANA DA	SAR	PELAYANAN	SOSIAL DAS	SAR	USAHA E	KONOMI DE	SA	PELESTARI <i>A</i> H	IN LINGKUN HDUP	IGAN		MASYARAKAT DESA		PEMERINTAHAN DESA KEMASYARA			١		
	KEGHIVIATAN, DESA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN	VOLU ME	BIA YA	HASIL KEGIATAN	VOLU ME	BIA YA
1	JAWA TIMUR																					
	1. KAB. TRENGGALEK																					
	1. KECAMATAN TUGU																					
	1. Banaran																					
	JUMLAH											•										

KEPALA DESA	

C. FORMAT SURAT KEPALA DESA PERIHAL PERMOHONAN PENYALURAN DD

KOP DESA

Nomor Sifat Lampiran Perihal	: 140///: Biasa: 2 (dua) Lembar: Permohonan PenyaluranDana Desa TahapTA	Kepada Yth. Bupati Trenggalek melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Trenggalek di - TRENGGALEK
	a. Peraturan Bupati Trenggale Pengelolaan Dana Desa Nomor Desa Tahun Anggaran	or Tahun tentang Anggaran
	 Tahap Tahun Anggaran berikut: Copy Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Be (untuk permohonan penyalur Copy buku Rekening Kas Laporan Realisasi Penyerapar Anggaran (untuk permohonan penyalur 	Desa (RKD)
	Selanjutnya, dari pag	u total Dana Desa TA mohon dapatnya disalurkan ke Rekening
	Demikian atas terkabu kasih.	Inya permohonan ini disampaikan terima
		KEPALA DESA,
	Mengetahui, CAMAT	<u></u>
I	 NIP	

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN (UNTUK TAHAP I) / TAHUN ANGGARAN (UNTUKTAHAP II) PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN

Pagu Desa Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	PENDAPATAN								
	Pendapatan Transfer								
	Dana Desa								
	- Tahap pertama								
	- Tahap Kedua								
	JUMLAH PENDAPATAN								
II	BELANJA								
	BIDANG PEMBANGUNAN DESA								
	1. Kegiatan								
	2. Dst								
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
	1. Kegiatan								
	2. Dst								
	JUMLAH BELANJA								
III	PEMBIAYAAN								
	Pengeluaran Pembiayaan								
	Penyertaan Modal Desa								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
JUMLA	AH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

Disetujui oleh,		
-----------------	--	--

Kepala Desa	Bendahara Desa	
<u></u>	<u></u>	
	BUPATI TRENGGALEK,	
	TTD EMIL ELESTIANTO	

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Nip . 19650919 199602 2 001